

Hari Terakhir Ganjil-Genap di Bogor, Lalu Lintas Lengang

BOGOR (IM)- Kondisi arus lalu lintas pada hari terakhir penerapan ganjil-genap di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, tampak lengang. Tak banyak kendaraan yang diputar balik oleh petugas, seperti dua hari sebelumnya.

Berdasarkan pantauan di check point ganjil genap Simpang Terminal Baranangsiang, hingga siang arus lalu lintas terlihat cukup lengang. Hanya sedikit kendaraan roda dua maupun roda empat yang masuk ke pusat Kota Bogor dari arah Tajur.

Meski begitu, petugas tetap memeriksa kendaraan di check point tersebut. Bagi kendaraan yang pelat nomor kendaraannya ganjil atau sesuai ketentuan diperbolehkan masuk ke pusat Kota Bogor.

Sementara pelat nomor kendaraan genap oleh petugas di lokasi diarahkan masuk ke GT Bogor atau kembali menuju Jalan Pajajaran arah Tajur.

Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdy Irawan mengatakan, sejauh ini aturan ganjil-genap cukup efektif dalam membatasi mobilitas masyarakat dibandingkan penyekatan sebelumnya.

"Kalau efektivitas tentu ganjil-genap. Sasaran jelas membedakan pelat kendaraan,

lebih gampang. Tapi, tentu kita melihat apakah sektor yang dimaksud dalam aturan pemerintah pusat itu kita harus cek ke hulunya. Jadi kalau dari pembatasannya cukup efektif, tapi sektor-sektor yang diizinkan itu harus ditinjau lebih lanjut," kata Ferdy, Minggu (25/7).

Nantinya, aturan ganjil-genap ini akan kembali dievaluasi dengan jajaran Satgas Covid-19 Kota Bogor atau Forkompinda, apakah akan diberlakukan pada hari kerja atau tidak. Itu sembari menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai PPKM Darurat.

"Kami akan evaluasi ganjil-genap dalam kurun waktu tiga hari ini. Juga malam ini menunggu pemerintah pusat bagaimana kelanjutan PPKM Darurat ini. Intinya malam ini akan kami bahas," tutur Ferdy.

Sebagaimana diketahui, aturan ganjil-genap di wilayah Kota Bogor berlangsung mulai 23-25 Juli 2021. Pada hari pertama, sebanyak 5.158 kendaraan roda dua dan roda empat diputarbalikkan oleh petugas.

Pada hari kedua, sebanyak 7.982 kendaraan diputarbalikkan. Untuk hari ini, masih akan dihitung oleh petugas dari beberapa titik check point. ● **gio**

Lagi, Bea Cukai Bogor Amankan Selundupan Tembakau Gorilla

BOGOR (IM)- Bea Cukai Bogor kembali membongkar upaya penyelundupan narkoba lewat modus pengiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT). Makin maraknya kasus dengan modus ini membuat Bea Cukai semakin waspada dan memperketat pengawasannya.

Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Edwan Isrin mengatakan bahwa penggalan kali ini diawali dari informasi dan analisa unit vertikal Bea Cukai sehingga membuat Bea Cukai Bogor bergerak menuju lapangan.

"Awalnya kami dapat informasi crawling dan analisa Tim Intelijen Cyber Patrol dan CNT Kanwil Bea Cukai Aceh yang disampaikan oleh Subdit Narkotika Kantor Pusat Bea Cukai, sehingga tim melakukan penulisan atas informasi tersebut," ungkap Edwan.

Bersama Satuan Narkotika Polres Bogor, Bea Cukai Bogor melakukan operasi gabungan di Bogor untuk melakukan penindakan. Dari hasil penulisan, tim mendapatkan paket

mencurigakan yang diberitahukan sebagai bahan herbal. Diketahui paket berasal dari Makassar yang akan dikirimkan ke penerima barang berinisial M yang beralamat di Jalan Batu Gede, Sukaraja, Cilebut Barat, Kab. Bogor.

"Atas paket yang diamankan oleh petugas, telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan 1 plastik klip berisi ± 10 gram diduga berupa NPP jenis Synthetic Cannabinoid (Tembakau Gorilla)," lanjut Edwan.

Kemudian atas informasi kedua, tim Bea Cukai Bogor bersama Polres Kabupaten Bogor, Bea Cukai Bogor berhasil menggagalkan pengiriman paket yang diduga berupa NPP jenis Synthetic Cannabinoid atau tembakau gorilla.

Pelaku diduga melanggar UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas penindakan tersebut telah dilakukan pengadministrasian penindakan oleh Bea Cukai Bogor dan barang bukti telah diserahkan kepada Polres setempat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI JAWA BARAT

Petugas medis memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada anak umur 12 hingga 17 tahun di sentra vaksinasi gratis swadaya Perumahan Maharaja dengan TNI - Polri di Depok, Jawa Barat, Minggu (25/7). Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah daerah di Jawa Barat dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus menggenjot pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat bertujuan agar kekebalan kelompok / herd immunity dapat segera terwujud.

BABAK BELUR AKIBAT PPKM

Pedagang Mal Bandung Bakal Buka Lapak di Jalanan

Para pedagang sekarang dalam kondisi kritis, denyut ekonomi para pedagang Bandung tidak ada sama sekali. Andai pemerintah atau pengelola tetap menutup pusat perbelanjaan, para pedagang akan berjualan di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima (PKL)," ujar Koordinator Aliansi Pedagang Kota Bandung, Ari saat ditemui di Pasar ITC Bandung, Minggu (25/7).

"Ini tidak hanya menyangkut pedagang, tetapi juga karyawan dan sektor lainnya yang berhubungan, kami mewakili pedagang di Bandung menyatakan sikap berdasarkan pertemuan kemarin, kami sepakat untuk berdagang kembali tanggal 26 Juli dengan prokes 5M yang ketat," ujar Ari melanjutkan.

Andai pemerintah atau pengelola tetap menutup pusat perbelanjaan, dikatakan Ari para pedagang akan berjualan di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima (PKL). "Karena pedagang kaki lima dilindungi dan diperbolehkan,

kritis, saya katakan dalam kondisi ini denyut ekonomi para pedagang Bandung tidak ada sama sekali," ujar Koordinator Aliansi Pedagang Kota Bandung, Ari saat ditemui di Pasar ITC Bandung, Minggu (25/7).

"Ini tidak hanya menyangkut pedagang, tetapi juga karyawan dan sektor lainnya yang berhubungan, kami mewakili pedagang di Bandung menyatakan sikap berdasarkan pertemuan kemarin, kami sepakat untuk berdagang kembali tanggal 26 Juli dengan prokes 5M yang ketat," ujar Ari melanjutkan.

Andai pemerintah atau pengelola tetap menutup pusat perbelanjaan, dikatakan Ari para pedagang akan berjualan di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima (PKL). "Karena pedagang kaki lima dilindungi dan diperbolehkan,

seandainya tutup (pusat perbelanjaan) kami akan berjualan di kaki lima," ujar Ari.

Ari mengatakan, pedagang di pusat perbelanjaan kerap terlupakan dari perhatian pemerintah. Padahal, masalah yang dihadapi oleh para pedagang di pusat perbelanjaan yang ditaksir berjumlah belasan ribu orang ini cukup pelik. Mulai dari harus membiayai karyawan, membayar uang sewa lapak, listrik dan tagihan yang lainnya.

"Kami berharap PPKM ini tidak berlaku diskriminatif terhadap para pedagang di pasar formal, padahal kami juga turut berkontribusi untuk ekonomi daerah lewat pajak yang kami bayarkan," katanya.

Perwakilan pedagang di Pasar Baru Bandung, Hisar Sitompul mengaku harus memeras uang modal usahanya untuk bisa melanjutkan

hidup. Pedagang yang memiliki usaha di bidang fesyen ini harus mengeluarkan uang jutaan rupiah per bulan untuk membiayai kebutuhan keluarga, membayar belasan karyawannya, membayar service charge dan kebutuhan lainnya.

"Kami menunggu kebijakan dari pemerintah kota dan Perumda Pasar Sae beri kami keselamatan untuk menjalankan usaha di tengah pandemi ini, negara harus memberikan keadilan seperti pada Pasal kelima Pancasila, dengarkan jeritan hati kami," ujar Hisar.

Seperti diketahui, masa perpanjangan PPKM Darurat rencananya akan berakhir Minggu (25/7). Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, akan ada PPKM Proporsional yang akan dilakukan di tingkat kabupaten/kota setelah PPKM Darurat ini berakhir. ● **pur**

BANDUNG (IM)- Perwakilan pedagang di mal atau pusat perbelanjaan yang terdampak PPKM Darurat sepakat untuk memaksakan berjualan pada Senin (26/7) ini. Pasalnya, pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 membuat mereka babak belur.

Pernyataan sikap itu dilontarkan oleh perwakilan pedagang dari sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Minggu (25/7). Pernyataan para pedagang ini pun akan segera dilayangkan kepada pemerintah di tingkat kota hingga pusat.

"Kondisi nyata para pedagang sekarang dalam kondisi

Banyak Rugikan Masyarakat, Dedie Tegur Pemilik Proyek Double Track

BOGOR (IM)- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menegur pihak Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat soal dampak proyek double track di Kota Bogor. Terbaru diketahui jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan dipenuhi oleh tanah dari proyek double track.

Alhasil hal ini membahayakan bagi pengendara motor. Selain itu, ada beberapa dampak lainnya seperti rumah warga yang rusak dan pipa besar Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang bocor.

"Ya saya berkomunikasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat dan mereka sebagai owner project sudah memberikan peringatan kepada kontraktor-kontraktor project berdasarkan pembagian area," ungkap Dedie akhir pekan kemarin.

Dedie melanjutkan, jadi

memang dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa kontraktor yang kadang-kadang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberikan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat.

"Balai teknik berjanji akan terus memberikan monitoring kepada seluruh sub bagian, seperti areal Batutulis sampai Rancamaya itu kontraktor A dan Rancamaya sampai dengan Giomas, kontraktor nya lain lagi," tuturnya.

Dedie juga mengatakan, hal ini karena percepatan untuk penyelesaian atau mengejar target dan ini proyek strategis nasional yang harus beres di sekitar tahun 2022, maka mungkin ada eksekusi termasuk kemarin bocornya pipa besar Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

"Kemarin saya pikir terkena beko tetapi bukan, jadi ada pegawai yang sedang me-

mindahkan tanah dan ada batu, tapi saya bertanya juga, itu kan pipa tebal. Kok bisa terkena batu? Ya, kayaknya sih itulah pokoknya," kata Dedie sambil memberikan isyarat kejadian bukan terkena batu.

"Saya minta hati-hati dalam pengerjaan dan apalagi masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai terjadi lagi beberapa hal serupa yang sudah terjadi di dalam proyek double track," tambah mantan pejabat KPK RI ini.

Dedie menegaskan, untuk persoalan jalan masing-masing segmen ada penanggungjawabnya, untuk rumah warga yang rusak akibat adanya proyek double track dan tanah yang berceceran bisa dikomunikasikan dengan kecamatan, kelurahan, RW maupun RT.

"Ada komunikasi-komunikasinya lewat aparat wilayah untuk pertanggungjawabannya," pungkasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PROGRAM PEMULIHAN DAS CITARUM

Warga menaiki perahu untuk menjala ikan di Sungai Citarum, Bojongsong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/7). Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Monash University di Melbourne Australia serta Universitas Indonesia dalam percepatan pengendalian pencemaran dan pemulihan DAS Citarum lewat solusi inovasi teknologi, konsep co-design perkotaan sebagai platform integratif dan pendekatan sosial bagi desa dan komunitas di sekitar Sungai tersebut.

RK: Pusat Baru Kirim Vaksin untuk 4,5 Juta Warga Jabar

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut dosis vaksin virus korona (Covid-19) yang diterima dari pemerintah pusat hingga saat ini baru sekitar 9 juta. Dengan demikian, baru 4,5 juta warga yang mendapat jatah vaksin karena satu orang disuntik dua dosis.

"Kami baru diberi vaksin kurang lebih 9 juta yaitu untuk 2 dosis, berarti hanya dapat jatah sementara 4,5 juta jiwa," kata Ridwan Kamil dalam silaturahmi Menko Polhukam dengan pimpinan agama dan pengasuh pondok pesantren se-Jawa Barat yang digelar virtual, Minggu (25/7).

Orang yang akrab disapa Emil itu memaparkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang 70 persen warganya perlu disuntik vaksin atau sekitar 35 juta jiwa. Bahkan Jawa Barat termasuk provinsi yang membutuhkan vaksin terbanyak.

"Kira-kira begitu. Jawa Barat ini yang paling besar karena 70 persen yang harus divaksin itu. Artinya sekitar

35 juta jiwa," kata dia.

Emil menekankan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat mendekati 50 juta jiwa dan perlu diselamatkan. Salah satunya dengan penyuntikan vaksin terhadap 70 persen atau 35 juta jiwa. Namun sejauh ini Jawa Barat baru mendapat dosis vaksin untuk 4,5 juta jiwa.

Jumlah penduduk Jawa Barat itu lebih banyak ketimbang daerah lain. Misalnya Jawa Timur dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa, Jawa Tengah 30 juta jiwa, Jakarta 10 juta jiwa dan Bali 5 juta jiwa.

Emil lalu menyinggung tugas berat kepala daerah level kabupaten/kota di Jawa Barat. Misalnya Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk 5 juta jiwa tetapi hanya dipimpin oleh satu orang bupati.

Luas wilayahnya Kabupaten Bogor, lanjutnya, sama dengan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin satu gubernur dan 17 bupati/walikota. "Jadi tantangan kepala daerah-daerah di Jawa Barat ini memang cukup lumayan," ujarnya. ● **pur**



IDN/ANTARA

JEMBATAN SUNGAI CITARUM RETAK

Sejumlah pengendara melintas pada sisi jalur Jembatan Sungai Citarum yang ditutup di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/7). Jembatan yang menjadi salah satu akses penghubung jalan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tersebut mengalami keretakan pada bagian bawah sehingga terpaksa ditutup dan arus lalu lintas dialihkan sementara untuk selanjutnya dilakukan penanganan perbaikan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.

PPKM LEVEL 4 BERAKHIR

Bima Arya: Aktivitas Ekonomi Bakal Dilonggarkan

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku mendapat bocoran informasi terkait masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 yang hari ini merupakan hari terakhir.

"PPKM Level 4 akan diperpanjang sesuai kategori wilayah dan adanya pelanggaran ekonomi," kata Bima Arya seusai bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Balai Kota Bogor, Minggu (25/7).

Bima menyebutkan, PPKM diperpanjang atau tidak, akan disesuaikan dengan level daerahnya. Bila di wilayahnya indikator (Covid-19) membaik, maka PPKM akan diturunkan ke level 3 atau 2. Sedangkan bagi yang belum memenuhi indikator, masih tetap di level 4.

"Level 4 pun akan diberikan

kelonggaran. Relaksasi yang saya lihat aktivitas ekonomi, khususnya pasar dan rumah makan," kata Bima.

Ia menuturkan, secara kewilayahan Kota Bogor masih dalam aglomerasi bersama Jabodetabek yang saat ini masih berada di level 4 atau yang tingkat penularan Covid-19 dalam kategori darurat. "Untuk detailnya teknis (relaksasi) kita tunggu pengumuman nanti malam," tambah Bima.

Hari ini, Minggu (25/7), menjadi hari terakhir penerapan PPKM Level 4 yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah.

Berdasarkan laporan Satgas Nasional Covid-19, Sabtu (24/7), kota dan kabupaten Bogor masih masih zona merah atau kategori tinggi penularan Covid-19 bersama Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. ● **gio**

BPBD Jabar Bangun Sentra Vaksin di 10 Kecamatan di Kab. Bogor

CIBINONG (IM)- Dalam upaya melakukan percepatan Program Vaksinasi Nasional guna memutus mata rantai penyebaran covid-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat menggandeng Pemerintah Kabupaten Bogor.

Mereka menggelar Sentra Vaksinasi yang akan dilaksanakan pada 26 Juli sampai 30 Agustus di 10 Sentra Vaksin Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan, selain untuk percepatan Program Vaksinasi Nasional, guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 Sentra Vaksinasi pun dilakukan untuk membangun kekebalan kelompok masyarakat di Kabupaten Bogor dengan usia di atas 18 tahun. "BPBD Jawa Barat bersama Pemkab Bogor akan menggelar Sentra Vaksinasi yang akan dilaksanakan pada 26, 28 Juli dan 2 Agustus untuk dosis 1, dan 23, 25 dan 30 Agustus untuk dosis 2, mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB di 10 Sentra

Vaksin Kecamatan di Kabupaten Bogor," jelas Dani, Sabtu (24/7).

Dikatakannya, masyarakat bisa segera melakukan vaksin dengan datang di 10 kecamatan di kabupaten Bogor. Adapun 10 kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Cileungsi, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojongsonggede, Tajur Halang, Parung, Kemang, Sukaraja dan Giomas.

"Sasaran penerima vaksin di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 56.000 akseptor vaksin covid-19," katanya.

Masyarakat juga bisa segera melakukan pendaftaran secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir secara online melalui <http://sentravaksinasi.kabogor.id> dan membawa KTP atau Surat keterangan Domisili Kabupaten Bogor pada saat pelaksanaan Vaksin.

"Dengan melindungi diri, melindungi negeri, perketat protokol kesehatan dan segera vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19," pungkaskan Dani. ● **gio**